KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN DI KALIMANTAN BARAT

Martoyo
Universitas Tanjungpura

surel: martoyo@fisip.untan.ac.id

Abstrak

Kebijakan pembangunan kawasan perbatasan di masa lampau di-image-kan sebagai "**halaman belakang**" wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kondisi tersebut membawa implikasi terhadap kondisi kawasan perbatasan saat ini yang terisolir dan tertinggal dari sisi sosial dan ekonomi. Munculnya paradigma ini, disebabkan sistem politik dimasa lampau yang sentralistik dan sangat menekankan stabilitas keamanan. Sehingga kebijakan pembangunan kawasan perbatasan selama ini memang belum dapat dilakukan secara optimal dan kurang terpadu, serta seringkali terjadi tarik menarik kepentingan antara berbagai pihak baik secara horizontal, sektoral maupun vertikal. Kondisi masyarakat sekitar daerah perbatasan di Kalimantan Barat seperti lepas dari perhatian kebijakan pemerintah daerah, karena dominannya pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah dalam menciptakan pelayanan publik di kawasan perbatasan masih mengalami kesusulitan aksesibilitas baik laut maupun darat menuju pusat-pusat pertumbuhan. Sulitnya aksesibilitas kehidupan memunculkan kecenderungan masyarakat perbatasan Kalimantan Barat dalam meningkatkan kehidupannya melakukan interaksi dengan masyarakat di wilayah negara tetangga (Serawak- Malaysia Timur).

Kata kunci : Kebijakan, Pembangunan dan Kawasan Perbatasan;

Abstract

Policy on the development of the border area in the past in-image as the "backyard " territory of the Unitary Republic of Indonesia (NKRI). The condition carries the implications of the current conditions of the border areas that are isolated and left from the social and economic side. The emergence of this paradigm, due to the political system of the past is centralistic and strongly emphasized security stability. So that the policy of development of the border area has not been able to be optimally and less integrated, and often occur the importance of the interest between various parties both horizontally, sectoral and vertically. The community condition surrounding the border area in the West Kalex as it is out of the attention of local government policy, because of the dominance of the central government, so that local governments in Mneiptakan public service in the boundaries of the border still The accessibility of both sea and land to growth centres. The difficulty of life accessibilitasthe trend of West Kalimantan border in increasing its life to interact with communities in neighboring countries (Serawak-east Malaysia).

Keyword : policy, development and border areas;

Pendahuluan

Secara geografis, Indonesia berbatasan dengan sejumlah negara tetangga, yakni dengan India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, PNG, Timor Leste, dan Australia. bagi Indonesia penanganan perbatasan masih merupakan salah satu persoalan pelik yang dihadapi pemerintah, terutama karena masih terdapat sejumlah bagian perbatasan dengan Negara-negara tetangga yang belum dapat diselesaikan.

Permasalahan kebijakan perbatasan bukan saja merupakan masalah internal suatu Negara, melainkan juga masalah yang mempunyai dimensi internasional. Penanganannya tidak dapat dilepaskan dari kerangka pelaksana politik luar negeri yang pada hakekatnya bermuara dari rangkuman berbagai aspek kep entingan dalam dan luar negeri ataupun aspek hukum, ekonomi, politik, keamanan dan pertahanan.

Menurut Mangasi Sihombing (2005 :1) dalam makalahnya yang berjudul "Pemahaman Penetapan dan Pengelolaan Perbatasan Sebagai Syarat Terciptanya Optimalisasi Pengelolaan Kerjasama Perbatasan Antarnegara" yang disampaikan dalam seminar sehari Pengembangan Kelembagaan Antar Negara, secara garis besar permasalahan perbatasan yang dihadapi oleh Indonesia terdiri : (a) penetapan batas negara yang mencakup darat dan laut, yang meliputi batas laut wilayah, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen (LK), (b) demarkasi batas darat dan pemanfaatan batas internasional dengan pemasangan pilar batas, (c) kerjasama perbatasan untuk memfasilitasi kegiatan tradisional masyarakat yang bersifat lintas batas dan kerjasama mengatasi masalah-masalah di wilayah perbatasan; dan (d) pengelolaan wilayah udara dan penerbangan komesil

internasional (FliQht Information Regional/FIR).

Selanjutnya Mangasi Sihombing (2005 :2) juga mengatakan bahwa kegiatan border diplomacy mencakup dua hal yaitu Physical boundaries dilakukan sehubungan dengan keperluan memberikan bingkai hukum yang pasti tentang wilayah nasional sesuai dengan prinsip hukum negara kepulauan, dan manajemen atau pengelolaan wilayah perbatasan bersifat tiga dimensi yaitu pada pengelolaan wilayah perbatasan di darat, laut dan udara.

Pelaksanaan politik luar negeri yang ditujukan dalam rangka pengelolaan batas negara yang melingkupi penetapan batas wilayah negara yang bersifat tiga dimensi (darat, laut, udara) serta kerjasama pemanfaatan ketiga matra wilayah negara sebagai suatu ruang kehidupan bersama bangsa Indonesia, telah diupayakan secara intensif oleh Departemen Luar Negeri melalui kebijakan yang dikenal sebagai border diplomacy. Pelaksanaan kebijakan tersebut diatas dilakukan melalui jalur diplomatik dengan melibatkan peran serta seluruh elemen bangsa, termasuk masyarakat yang mendiami daerah perbatasan dan diharapkan akan bermanfaat untuk pengukuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa Library Research dengan memanfaatkan data-data skunder yang pengumpulan datanya dari perpustakaan, buku-buku, jurnal, artikel, media cetak, media elektronik, dan website yang telah diolah menjadi data untuk diklasifikasikan yang kemudian disusun, diringkas, dianalisa dan disimpulkan sesuai permasalahan yang diteliti.

Pembahasan

Strategi Kebijakan Pembangunan Perbatasan

Formula kebijakan pembangunan perbatasan sangat terkait dengan pemahaman hukum internasional, hukum internasional merupakan keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara lain :

- (1) Negara dengan Negara
- (2) Negara dengan subyek hukum lain bukan Negara atau subyek hukum bukan negara satu sama lain (Kusumaatmadja, 1989 :3).

Pengertian hukum internasional didasarkan atas pikiran adanya suatu masyarakat internasional yang terdiri atas sejumlah Negara yang berdaulat dan merdeka (independent) dalam arti masing-masing berdiri sendiri yang satu tidak di bawah kekuasaan yang lain. Dengan perkataan lain hukum internasional merupakan suatu tertib hukum koordinasi antara anggota masyarakat internasional yang sederajat.

Untuk menerbitkan, mengatur, dan memelihara hubungan antarnegara ini dibutuhkan hukum internasional guna menjamin unsur kepastian yang diperlukan dalam setiap hubungan yang diatur. Namun hubungan antara Negara-negara atau hubungan internasional yang teratur tidak mungkin tanpa menerima pembatasan terhadap kedaulatan Negara yang menjadi anggota masyarakat itu.

Kedaulatan merupakan kekuasaan hukum tertinggi suatu bangsa untuk membentuk serta melaksanakan hukum di dalam suatu wilayah tertentu seperti diatur menurut hukum internasional. (Nasution, 1984 : 161). Sedangkan kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi dapat diartikan sebagai (1) Kekuasaan itu terbatas pada batas wilayah Negara yang memiliki

kekuasaan itu dan (2) kekuasaan itu berakhir di mana kekuasaan suatu Negara lain mulai. (Kusumaatmadja, 1989 :13).

Perbatasan merupakan tanda batas paling luar yang membatasi wilayah yang dikuasaaai suatu Negara. Batas ini dapat berupa suatu garis yang tegas dan pasti atau suatu jalur atau zona dengan lebar tertentu. Dimana batas berupa garis (linear boundary) lebih umum dipakai karena lebih pasti, memudahkan dalam pengaturan administrasi. Kesukarnanya antara lain dalam penjagaan dan pengaturan lalu lintas, perhubungan dan pergaulan penduduk-penduduk daerah perbatasan, terutama jika terjadi konflik diantara Negara-Negara yang berbatasan.

Sedangkan batas zona (zonal boundary) berupa zona yang secara sosial ekonomnisa dan etnis lebih menguntungkan sebab lebih memberi kebebasan kepada penduduk daerah perbatasan untuk tukar-menukar dan melaksanakan pergaulan sehari-hari. Kelemahannya adalah kurang tepat, sering menimbulkan kesukaran dan masaalah jika terjadi konflik.

Perbatasan pada umumnya adalah dua dimensional, dalam arti bahwa yang dibatasi bukan hanya keadaan topografi di atas permukaan, akan tetapi perbatasan itu dengan sendirinya juga membagi tanah dan kerak bumi di bawahnya serta ruang di atasnya. Perbatasan yang dimaksudkan di sini adalah perbatasan darat, untuk membedakan dengan perbatasan laut.

Adapun pengertian perbatasan darat menurut Sumardiman (1992 :4) adalah tempat kedudukan titik-titik atrau garis-garis yang memisahkan daratan atau bagiannya ke dalam dua atau lebih wilayah kekuasaan yang berbeda. Selanjutnya beliau juga mengatakan bahwa perbatasan mempunyai sifat ganda, artinya bahwa garis batas itu mengikat dua belah pihak pada sebelah menyebelah perbatasan tersebut, jadi perubahan pada satu pihak,

akan menimbulkan perubahan pada pihak yang lain, demikian pula hak-haknya.

Perbatasan Negara bukanlah suatu yang tetap, ia selalu mengalami perubahan dan pergeseran sebagai akibat adanya perubahan dan pergeseran-pergeseran dalam tata kehidupan politik dunia. Seperti dikemukakan oleh Boggs bahwa fungsi-fungsi yang dimainkan oleh perbatasan politik dapat berubah setiap saat. (Dikshit, 1982 :70).

Perubahan batas Negara ini erat hubungannya dengan fungsi batas itu sendiri, antara lain :

- 1). Ke dalam : yaitu untuk kepentingan pengaturan administratif, pelaksanaan hukum, okupasi dan penggalian sumber-sumber kekayaan, untuk kepentingan strategi militer, dan sebagainya.
- 2). Ke luar : untuk pertahanan keamanan dalam hubungannya dengan politik luar negeri, mewujudkan integritas nasional dan hak-hak yang menyangkut perjanjian-perjanjian baik bilateral, multilateral atau internasional, baik yang bersifat ekonomis, maupun politis atau militer.

Fungsi perbatasan Negara dapat bersifat militer dan non militer. Dalam hubungan ini, Nicolas John Spykman dalam buku Suwardi Wiriaatmadja (1970 : 105) mengatakan : "*The boundary is not only a line of demarcation between legal systems but also a point of contact of territorial power structures. From the long term point of view, the position of that line may become an index to the power relations of the contending forces*". (Perbatasan adalah tidak hanya sebuah garis batas demarkasi diantara sistem yang resmi tapi juga sebuah kontak poin dari struktur kekuasaan teritorial. dari pandangan jangka panjang, posisi garis itu mungkin menjadi sebuah petunjuk terhadap hubungan kekuasaan dari pasukan yang bertikai).

Bagaimanapun juga, fungsi batas Negara berbeda-beda untuk setiap Negara tergantung kepada ideologi yang dianut, filsafat dan tujuan masing-masing Negara. Oleh karena pentingnya perbatasan Negara, maka ia memerlukan pengawasan dan pengamanan, Dalam hal ini Daldjoeni (1991 :141) mengatakan penjagaan perbatasan dilakukan dengan berbagai macam tujuan. Selanjutnya beliau juga mengatakan bahwa harus adanya aturan di daerah perbatasan karena jika tidak akan menimbulkan berbagai kekalutan.

Perbatasan merupakan faktor utama dalam kehidupan masyarakat karena fungsi bentangan yang ditunjukkannya dalam memisahkan Negara-Negara adi dunia, yang mana dengan demikian akan mempengaruhi seluruh pola ruang dan organisasi dari aktivitas-aktivitas politik, sosial, dan ekonomi mereka. Seperti dikemukakan oleh Losch (dalam Dikshit, 1982 :71) : "*The presence of political boundary created price differential in certain commodities, and that these differentials became effective determinants in the locations of retail outlets of those commodities*". (Kehadiran garis batas politik menciptakan perbedaan harga pada komoditas-komoditas tertentu dan perbedaan-perbedaan menjadi faktor-faktor penentu yang sangat berpengaruh terhadap keberadaan pedagang-pedagang eceran dari komoditas tersebut.

Strategi kebijakan pembangunan yang berlandaskan pada paradigma pembangunan daerah yang dewasa ini dikembangkan, adalah mengacu pada hal-hal yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Beberapa uraian yang terkandung di dalam undang-undang tersebut tersiarat bahwa, di dalam langkah penetapan strategi kebijakan apapun yang diambil oleh pemerintah daerah di dalam pembangunan wilayah daerahnya hendaklah selalu terkait dengan upaya pemberdayaan, penumbuhan prakarsa,

peningkatan kreativitas dan peningkatan peran-peran serta masyarakat di dalam proses pembangunan. Pelaksanaan otonomi daerah yang titik berat pelaksanaannya dilakukan pemerintah kabupaten dan kota, maka strategi penetapan kebijakan dan program pembangunan haruslah selalu terkait dengan obyek dan subyek kebijakan, yakni kondisi fisik (geografis) dan masyarakatnya (demografis). Sebagaimana dinyatakan oleh Robert Everstone (dalam Winarno, 2002 :4) menyatakan bahwa, secara luas penetapan kebijakan publik merupakan bentuk hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya.

Sementara itu, Dror (dalam Islamy, 2002; 31) menyatakan, proses pembuatan kebijakan public yang dilakukan oleh para aktor-aktor kebijakan pemerintah bersama masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat tertentu dapat membantu terciptanya rasionalitas kebijaksanaan. Sehingga, setiap langkah kegiatan-kegiatan penetapan kebijakan sebagai suatu proses yang menunjukkan adanya tahapan-tahapan kebijakan. Strategi kebijakan sebagai suatu cara dan langkah yang digunakan dalam membuat suatu kebijakan diperlukan adanya tahapan-tahapan kebijakan.

Berbicara kebijakan perbatasan maka bayangan kita adalah suatu garis pemisah antara satu daerah dengan daerah lain. Untuk itu wilayah perbatasan menurut Mabes TNI dibagi menjadi dua bagian yaitu Lini I dan Lini II. Kecamatan Perbatasan Lini I adalah Kecamatan yang berbatasan langsung dengan Negara Tetangga, sedangkan Kecamatan Perbatasan Lini II adalah Kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Perbatasan I. Istilah Kecamatan Lini I dan Lini II juga tertuang dalam "Perjanjian Lintas Batas Indonesia Malaysia Tahun 1967 dan revisi Tahun 1984".

Terhadap persoalan perbatasan Negara, pada awalnya memang terfokus

pada bidang pertahanan, keamanan dan penyesuaian kembali terhadap perubahan-perubahan isi perjanjian. Namun saat ini justru yang lebih mendapat perhatian adalah fungsi-fungsi sosial ekonomi yang dimiliki perbatasan tersebut, dimana House (dalam Dikshit, 1982 :75) mengatakan bahwa : "*Defence and security are no longer the major concern along most boundaies in the contemporary world; a vast majority of international boundaries are uncontested and most ly have economic and social functions*" (pertahanan dan keamanan tidak lagi menjadi masalah besar di sepanjang garis perbatasan dizaman sekarang, garis batas antara Negara yang sangat luas tidak dipermasalahkan dan kebanyakan mempunyai fungsi ekonomi dan sosial).

Sering dijumpai bahwa kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang bertempat tinggal di sepanjang perbatasan begitu menyedihkan, yang disebabkan oleh berbagai alasan. Masyarakat tersebut sewaktu-waktu mungkin dapat menyesuaikan diri pada pola kehidupan baru yang ditirunya, namun perbatasan itu sendiri sering menjadi faktor penghalang dalam kondisi-kondisi kehidupan setempat. (House, diringkas oleh Dikshit, 1982 :77).

Masyarakat di perbatasan secara sadar atau tidak sadar cenderung lebih meprioritaskan hubungannya dengan rakyat Negara lain daripada dengan sesama bangsanya sendiri. Hal ini tercermin pada adanya 'perasaan' yang lebih dekat kepada masyarakat di seberang perbatasan.

Ada dua orientasi terkait formula kebijakan perbatasan, yaitu sebagai berikut :

- 1). Orientasi atau mempertahankan kegiatan-kegiatan ekonomi dengan Negara-Negara tetangga, atau memanfaatkan kelebihan ekonomis yang terdapat di luar perbatasan. Hal ini disebabkan bukan saja oleh citra

positif terhadap perekonomian Negara-Negara tetangga itu, melainkan juga didorong oleh faktor-faktor cultural dan histories.ekonomi; dimana masyarakat daerah perbatasan mengembangkan dan

- 2). Orientasi politik ; yaitu sikap masyarakat perbatasan yang menganggap rakyat atau pemerintah di Negara seberang sebagai saudara, sehingga menjadikan Negara tetangga sebagai sumber dukungan bagi sikap dan tingkah laku politik mereka. Orientasi politik itu dikembangkan atas dasar ikatan-ikatan cultural dan histories yang ada diantara kedua masyarakat.

Perbatasan tidak selamanya hampa dari hal-hal yang bersifat menguntungkan, setidaknya bagi beberapa pemukiman penduduk di sepanjang kawasan perbatasan. Sebagaimana dikemukakan oleh House (dalam Dikshit, 1982 :77). *"At or near the major crossing points there is often aggr egration of special services at establishments located as close to the boundary as possible in order to take advantage (legal or illegal) of distinct to the differential between states"*. (Di dan dekat titik lintas batas terdapat penempatan kesatuan dari pasukan tertentu ditempatkan dilokasi sedekat mungkin ke perbatasan dengan tujuan mengambil keuntungan (baik resmi maupun tidak resmi) disebabkan perbedaan harga yang tinggi diantara Negara).

Strategi kebijakan pembangunan yang berlandaskan pada paradigma pembangunan daerah yang dewasa ini dikembangkan, adalah mengacu pada hal-hal yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Beberapa uraian yang terkandung di dalam undang-undang tersebut tersiarat bahwa, di dalam langkah penetapan strategi kebijakan apapun yang diambil oleh pemerintah daerah di dalam pembangunan wilayah daerahnya hendaklah selalu terkait dengan upaya

pemberdayaan, penumbuhan prakarsa, peningkatan kreativitas dan peningkatan peran-peran serta masyarakat di dalam proses pembangunan. Pelaksanaan otonomi daerah yang titik berat pelaksanaannya dilakukan pemerintah kabupaten dan kota, maka strategi penetapan kebijakan dan program pembangunan haruslah selalu terkait dengan obyek dan subyek kebijakan, yakni kondisi fisik (geografis) dan masyarakatnya (demografis). Sebagaimana dinyatakan oleh Robert Everstone (dalam Winarno, 2002 :4) menyatakan bahwa, seacara luas penetapan kebijakan publik merupakan bentuk hubungan suatu unit apemerintah dengan lingkungannya.

Aneka Wajah Kawasan Perbatasan

1. Kebijakan pembangunan kawasan perbatasan di masa lampau di-image-kan sebagai **"halaman belakang"** wilayah NKRI. Kebijakan tersebut membawa implikasi terhadap kondisi kawasan perbatasan saat ini yang terisolir dan tertinggal dari sisi sosial dan ekonomi. Munculnya paradigma ini, disebabkan sistem politik dimasa lampau yang sentralistik dan sangat menekankan stabiulitas keamanan. Disamping itu secara historis, hubungan Indonesia dengan beberapa negara tetangga pernah dilanda konflik, serta seringkali terjadinya pemberontakan-pemberontakan di dalam negeri. Kebijakan penanganan kawasan perbatasan pada saat itu lebih didominasi pandangan untuk mengamankan perbatasan dari potensi ancaman dari luar (*external threat*) dan cenderung memposisikan kawasan perbatasan sebagai sabuk keamanan (*security belt*).

2. Kehidupan masyarakat di kawasan perbatasan yang miskin infrastruktur dan tidak memiliki akstabilitas yang baik, pada umumnya sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi di negara tetangga. Kawasan perbatasan di Kalimantan misalnya, kehidupan sosial ekonomi masyarakat, pada umumnya berkiblat ke wilayah negara tetangga. Hal ini disebabkan adanya infstrastuktur yang lebih baik atau pengaruh sosial ekonomi yang lebih kuat dari wilayah negara tetangga. Secara jangka panjang, adanya kesenjangan pembangunan dengan negara tetangga tersebut berpotensi untuk mengundang kerawanan di bidang politik.

Akumulasi permasalahan yang terjadi di setiap kawasan perbatasan dapat dilihat dari tingginya jumlah keluarga prasejahtera di kawasan perbatasan serta kesenjangan sosial ekonomi dengan masyarakat di wilayah perbatasan negara tetangga. Hal ini disebabkan oleh akumulasi berbagai faktor, seperti rendahnya multi sumberdaya manusia, minimnya infrastruktur pendukung, rendahnya produktivitas masyarakat dan belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam di kawasan perbatasan. Implikasi lebih lanjut dari kondisi kemiskinan masyarakat di kawasan perbatasan mendorong masyarakat terlibat dalam kegiatan-kegiatan ekonomi ilegal guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini selain melanaggar hukum dan potensial menimbulkan kerawanan dan ketertiban juga sangat merugikan negara. Selain kegiatan ekonomi ilegal, kegiatan ilegal lain yang terkait dengan aspek politik, ekonomi dan keamanan juga terjadi di kawasan perbatasan baik laut maupun darat seperti penyelundupan senjata, amunisi dan bahan peledak. Kegiatan

ilegal ini terorganisir dengan baik sehingga perlu koordinasi dan kerjasama bilateral yang baik untuk menuntaskannya.

Simpulan

1. Ketertinggalan yang sangat kontras di kawasan perbatasan Kalbar (Indonesia) baik keterbatasan infrastruktur (prasarana transportasi, telekomunikasi) dan adanya akseibilitas yang rendah dan sulit dijangkau adalah sebagai akibat lemah dan minimnya konsentrasi pembangunan di kawasan perbatasan serta belum diprioritaskannya kawasan perbatasan didalam penyusunan strategi kebijakan pembangunan daerah selama ini.
2. Dalam bidang pelayanan publik, kawasan perbatasan masih mengalami ksesulitan aksesibilitas baik laut maupun darat menuju pusat-pusat pertumbuhan. Di wilayah Kalimantan Barat, sulitnya aksesibilitas memunculkan kecenderungan masyarakat untuk berinteraksi dengan masyarakat di wilayah negara tetangga (Serawak dan sabah). Minimnya aksesibilitas dari dan keluar kawasan perbatasan wilayah merupakan salah satu faktor yang turut mendorong orioentasi masyarakat yang cenderung berkiblat aktivitas sosial ekonominya ke negara tetangga. Hal tersebut sebagai dampak dari minimnya sarana dan prasarana yang ada baik dibidang pendidikan dan kesehatan serta kualitas SDM masyarakat di sebagian besar kawasan perbatasan masih rendah. Masyarakat belum memperoleh pelayanan kesehatan dan

- pendidikan sebagaimana mestinya akibat jauhnya jarak dari pemukiman dengan fasilitas yang ada. Optimalisasi potensi sumber daya alam dan pengembangan ekonomi di kawasan perbatasan akan sulit dilakukan. Rendahnya tingkat pendidikan, ketyerampilan, serta kesehatan masyarakat merupakan salah satu faktor utama yang menghambat pengembangan ekonomi kawasan perbatasan untuk dapat maju sejajar dengan wilayah negara tetangga.
3. Adanya kesamaan budaya, adat dan keturunan (suku yang sama) di beberapa kawasan perbatasan seperti di Kalimantan Barat (Dayak dan Melayu), menyebabkan adanya kegiatan pelintas batas tradisional yang ilegal dan sulit dicegah. Persamaan budaya dan adat masyarakat dan kegiatan pelintas batas tradisional ini merupakan isu sekaligus masalah perbatasan antarnegara yang telah ada sejak lama dan kini muncul kembali seiring dengan penanganan kawasan perbatasan darat di Kalimantan Barat. Kegiatan lintas batas ini telah berlangsung lama namun sampai saat ini belum dapat diatasi oleh kedua pihak (negara).
 4. Di beberapa kawasan perbatasan terdapat tanah adat/ulayat yang berada di dua wilayah negara. Tanah ulayat ini sebagian menjadi ladang penghidupan yang diolah sehari-hari oleh masyarakat perbatasan, sehingga pelintas batas antarnegara menjadi hal yang biasa dilakukan setiap hari. Keberadaan tanah ulayat yang terbagi dua oleh garis perbatasan, secara astronomis memerlukan pengaturan tersendiri serta dapat menjadi permasalahan dikemudian hari jika tidak ditangani secara serius.
 5. Kebijakan pengembangan perbatasan selama ini memang belum dapat dilakukan secara optimal dan kurang terpadu, serta seringkali terjadi tarik menarik kepentingan antara berbagai pihak baik secara horizontal, sektoral maupun vertikal. Lebih memperhatikan lagi keadaan masyarakat sekitar daerah perbatasan Negara seperti lepas dari perhatian dimana penanganan daerah batas Negara menjadi dominan pemerintah pusat saja, pemerintah daerah tidak pernah diajak serta dan masyarakat tidak mendapat perhatian.
 6. Mencermati kebijakan yang selama ini diterapkan dalam menangani perbatasan, terjadi adanya tumpang tindih antar institusi dan belum adanya satupun peraturan kebijakan secara khusus mengatur tentang pengelolaan perbatasan antar negara. Walaupun berdasarkan data bahwa sejak tahun 1957 sampai dengan saat ini telah dikeluarkan sebanyak 23 (dua puluh tiga) peraturan yang menyangkut masalah perbatasan, namun tidak satupun aturan tersebut yang mengatur tentang pengelolaan kawasan perbatasan.
- Pengelolaan kawasan perbatasan belum dilakukan secara terpadu dengan mengintegrasikan seluruh sektor terkait. Sampai saat ini, permasalahan beberapa kawasan perbatasan masih ditangani secara ad hoc, sementara (*temporer*) dan parsial serta lebih didominasi oleh pendekatan keamanan (*security*) melalui beberapa kepanitiaan (*commimtee*),

sehingga bekum memberikan hasil yang optimal. Komite-komite kerjasama penanganan masalah perbatasan yang ada saat ini antara lain *General Border Comitee (GBC) RI - Malaysia, Joint Border Committee JBC) RI - Papua New Guine; dan Joint Border Committee RI -*

Buku:

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Provinsi Kalimantan Barat, 2002, *Perekonomian dan Prasarana Wilayah Perbatasan*, Pontianak.

Daldjoeni, N. 1910. *Dasar-Dasar Geografi Politik*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Dikshit, R. D. 2000. *Political Geography : A. Contemporary Perspektive*, Tata Mc. Grow-Hill Publishing Company Limited, New Delhi.

Effendi, Sofian dkk, 2007. *Alternatif Perencanaan Adminitsrasi ; Suatu Analisis Retrospektif dan Prospektif*, EDisi Revisi Seri Monografi, Fisipol UGM, Yogyakarta.

Hamid, Sri Handoyo Mukti dan Tien Widiyanto, 2001, *Kawasan Perbatasan Kalimantan: Permasalahan dan konsep pengembangan*, PUsat pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah, BPPT.

Islamym, Irvan M. 2002, *Prinsif-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara, Jakarta.

Jones, Charles O, 1991. *Pengantar Kebijaksanaan Publik*, Rajawali Press, Jakarta.

UNMISSET (Timor Leste) belum mampu mengakomodasi pemecahan masalah perbatasan.

Referensi

Kusumaatmadja, Mochtar, 1989. *Pengantar Hukum Internasional*, FISIP PRESS UNPAD, Bandung.

Moloeng, G. A. *Theory of Foreign Policy*; Terjemahan oleh S. Wahyudi, Sospol UGM. Yogyakarta.

Nasution, Dahlan, 2004. *Perang atau Damai Dalam Kawasan Politik Internasional*, Penerbit REmadja Karya CV, Bandung.

Sihombing, Mangasi, 2005. *Pemahaman Penetapan dan Pengelolaan Perbatasan Sebagai Syarat Tercapainya Optimalisasi Pengelolaan Kerjasama Perbatasan Antar Negara*, Makalah disampaikan pada seminar sehari "Pengembangan Kelembagaan Perbatasan Antar Negara" Bappenas, Jakarta.

Sumardiman, Adi, 2002. *Seri Hukum Internasional: Wilayah Indonesia dan Dasar Hukumnya*, Buku I Perbatasan Indonesia-PNG, PT. Pradnya Paramitra, Jakarta.

Wahab, Abdul, Solihin, 2009. *Analisa Kebijaksanaan*, Bumi Aksara, Jakarta.

Widjaja, A.W. 2001, *Pemerintahan Desa, Marga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999*

- Tentang Otonomi Daerah, PT.
Raja Grafindo Persada,
Jakarta.
- Dunn, William, N. 2003. Pengantar
Analisis Kebijakan Publik,
Edisi kedua, Gajah Mada
University Press, Yogyakarta.
- Wiriaatmadja, Suwardi, 2001. Pengantar
Ilmu Hubungan Internasional,
Alumni, Bandung.